

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori/Konsep

1. Supervisi

a. Sejarah Supervisi Pendidikan

Sebelum konsep supervisi dimunculkan dalam studi administrasi, para administrator telah lebih dulu mengenal konsep inspeksi. Antara konsep inspeksi dan supervisi terdapat pertentangan yang tajam dalam prinsip dan tindakannya. Inspeksi lebih menekankan kepada kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan dan bersifat otoriter. Di pihak lain supervisi lebih menekankan kepada persahabatan yang dilandasi oleh pemberian pelayanan dan kerjasama yang lebih baik dan bersifat demokratis. Kedua konsep ini tidak dapat disamakan dalam arti, konsep inspeksi tidak dapat menjadi alternatif atas konsep supervisi.¹

Perbedaan lain yang menunjukkan konsepsi inspeksi dan supervisi tidak dapat diidentikan ialah karena masing-masing konsep itu mempunyai tujuan dan datang dari kawasan proses manajemen yang berbeda. Dalam proses manajemen supervisi berada di dalam kawasan pengawasan atau “*Controlling*”. Dengan demikian supervisi cenderung kepada usaha pelayanan dan pemberian bantuan dalam rangka memajukan dan

¹ Binti Maunah, *Supervisi Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 1-2.

meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Sedang inspeksi cenderung kepada kegiatan menyelidiki dan memeriksa penyimpangan dan kekeliruan yang sengaja atau tidak dibuat oleh petugas dalam pelaksanaan program pengajaran di sekolah.²

Bila diperhatikan evolusi perkembangan supervisi, ia mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan lebih dari satu seperempat abad yang lalu. Namun demikian dalam praktik dan pelaksanaan di lapangan bervariasi menurut ayunan gerak pertumbuhan dan perkembangan keadaan sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Ia tumbuh dan berkembang mengikuti irama kondisi dan situasi kemasyarakatan pada masa itu.

Sepanjang masa sebutan supervisi sekolah mengalami pasang naik dan surut diantara peranan yang berorientasi pada guru dan peranan yang bersifat administratif, setiap peranan berayun merumuskan kembali fungsi supervisi yang dimaksud. Pada tahun 1980-an dalam dunia supervisi sedang berlangsung ke arah manajemen.³

Bila ditinjau dari sejarah supervisi pendidikan, terutama pada negara yang sudah maju ternyata peranan-peranan yang dialami oleh supervisor telah berkembang secara evolusi. Dalam abad ke 18 dan ke 19 misalnya belum ada istilah inspeksi. Pada waktu itu berdasarkan catatan

² Nurtain, *Supervisi Pendidikan: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Departemen Pendidikan, 1989), 2.

³ *Ibid.*, 2.

sekolah di Amerika Serikat dikontrol oleh suatu badan yang terdiri dari orang awam. Mereka secara periodik meninjau fasilitas, perlengkapan dan kemajuan murid-murid yang hadir di sekolah. Hubungan antara inspektur dengan guru-guru sering bersifat tegang dan menghukum. Tindakan inspektur-inspektur ditandai dengan menyuruh, mengatur, menghakimi dan kadang-kadang dalam kunjungan mereka ke sekolah dapat memecat atau memberhentikan guru-guru. Perkembangan yang hampir serupa juga terjadi dalam sejarah pendidikan di Indonesia zaman VOC.

Perkembangan yang hampir serupa juga terjadi dalam sejarah pendidikan di Indonesia zaman VOC (De Vereenigde Oost Indische Compagnie) tahun 1602-1799. Dalam tahun 1673 peraturan-peraturan tentang inspeksi yang pertama kali bagi sekolah-sekolah di Ambon menetapkan bahwa kunjungan ke sekolah harus dilakukan secara tiba-tiba, mencatat murid-murid yang hadir dan tidak hadir, dan bersamaan dengan kunjungan inspeksi itu diperiksa pula apakah guru-guru dan murid-murid telah melakukan kewajibannya serta memeriksa pelaksanaan pendidikan agama.⁴

Menurut catatan yang diperoleh dari kepustakaan (Kroes-kamp, 1974), kegiatan inspeksi pada masa itu meliputi pemeriksaan tentang kemajuan-kemajuan murid dalam membaca, menulis dan pelajaran Agama. Inspektur mengatakan kepada guru-guru tentang apa yang salah dan

⁴ Binti Maunah, *Supervisi ...*, 4.

bagaimana hal tersebut sebaiknya dilaksanakan. Gambaran situasi itu terjadi pada masa belum ada lembaga pendidikan guru yang sengaja disiapkan untuk menghasilkan tenaga guru. Pada waktu itu guru-guru yang mengajar di sekolah memiliki tidak lebih dari sekedar keinginan untuk mengajar atau mendapatkan beberapa “gulden” saja tiap bulan bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Lagi pula saat itu tidak banyak orang yang berminat untuk menjadi guru. Oleh karena itu suatu bentuk inspeksi yang ketat dan yang langsung ke sekolah memang diperlukan.⁵

Dalam awal abad ke 19 perhatian terhadap inspeksi semakin meningkat yang disebabkan pertama meningkatnya jumlah murid di sekolah dan kedua perlunya guru-guru yang belum memiliki pendidikan guru diberi petunjuk praktis oleh inspektur. Dalam masa itu terdapat tiga kategori guru yang mengajar di sekolah-sekolah ialah (1) “guru” yaitu orang yang telah menyelesaikan dengan baik program pendidikan yang lengkap di sekolah guru, (2) “guru bantu” atau “kandidat” yaitu orang yang telah menyelesaikan pendidikan dasarnya kemudian diberi latihan praktik mengajar dan lulus dalam menempuh ujian guru, dan (3) “wekling” atau “kweekeling”, yaitu orang yang tidak memiliki kewenangan untuk

⁵ *Ibid.*, 4-5.

mengajar dipekerjakan sebagai guru atas rekomendasi dari Komisi Sekolah setempat.⁶

Pada awal abad ke 20 inspeksi sekolah yang terdiri dari orang awam itu telah hampir seluruhnya diganti dengan petugas inspeksi khusus yang bertugas memeriksa guru-guru dalam ruang kelas. Tugas supervisi dirumuskan kembali secara lebih eksklusif terutama yang berkaitan dengan pengajaran dalam kelas sebagai akibat meningkatnya tanggungjawab “superintendent” yang dapat disamakan dengan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Kotamadya/Kabupaten atau Kepala Bidang Pendidikan di Kantor Wilayah Tingkat I.⁷

Dalam pertigaan abad ke 20 pendidikan di Amerika khususnya sangat dipengaruhi oleh model-model mekanisasi industri dan pelaksanaan dari apa yang disebut manajemen ilmiah. Dampak atau pengaruh dari orientasi industri dalam pendidikan telah meresap dan mendominasi pelaksanaan supervisi pendidikan hampir seperempat lamanya.⁸

Pada permulaan tahun 1930-an supervisi pendidikan di Amerika Serikat berlangsung kurang efektif dalam melaksanakan peranan sebagai inspektur. Para supervisor sering diejek sebagai orang yang suka mengintai-intai urusan orang lain di balik belakang mereka, yang hanya

⁶ Oteng Sutisna, *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis Untuk Praktik Profesional*, (Bandung: Angkasa, 1980), 34.

⁷ Nurtain, *Supervisi ...*, 5.

⁸ *Ibid.*, 6.

mampu bekerja dengan guru-guru kelas secara mekanistik dihubungkan dengan dimensi penilaian dari observasi dan laporan mereka. Dan, pada permulaan tahun 1960-an para supervisor menjadi badan penyusun mata pelajaran yang terpisah-pisah dan kebanyakan supervisor pada masa itu tetap berada dalam peranan ini. Dalam akhir tahun 1960-an tujuan umum kebanyakan daerah pendidikan tidak dapat dipertahankan lagi. Banyak sekali perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang begitu singkat sehingga menimbulkan terlalu padat dan sesaknya kurikulum sekolah. Kepustakaan mengenai supervisi pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an terutama sekali sangat memperhatikan analisis poses mengajar belajar dan konsep baru yang dikenal dengan sebutan “Supervisi klinik”.⁹ Akan tetapi pada akhir tahun 1970-an, tekanan politik dan ekonomi terhadap sekolah sangat begitu hebat sehingga para administrator kembali lagi pada orientasi dunia industri. Pada pertengahan tahun menjelang tahun 1980-an para supervisor memegang bermacam-macam jabatan yang aneh seperti: Pembantu Kepala Sekolah bidang pengajaran atau Manajer Program. Penyebaran para supervisor pada tingkat daerah, sekolah dan ruang kelas terlalu beragam untuk membuat generalisasi tentang pola-pola yang timbul. Jelaslah supervisor sekarang membicarakan bahasa

⁹ Binti Maunah, *Supervisi ...*, 11.

manajemen dan pada kebanyakan daerah mereka berada dalam “tim administratif”.¹⁰

Supervisi menjadi bagian dari manajemen pendidikan, hal ini terbukti bahwa dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 terdapat bab khusus mengenai pengawasan. Oleh karena itu supervisi pendidikan mempunyai kedudukan strategis dan penting dalam manajemen pendidikan, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk berupaya secara terus menerus menjadikan para pelaksana supervisi pendidikan sebagai tenaga profesional.¹¹

b. Pengertian Supervisi Pendidikan

Ada beberapa devinisi tentang supervisi pendidikan, antara lain adalah:

1. Menurut P. Adam dan Frank G. Dickey seperti yang dikutip oleh Hidayat Soetopo, supervisi adalah program yang berencana untuk memperbaiki pelajaran. Program ini dapat berhasil apabila Supervisor memiliki ketrampilan dan cara kerja yang efisien dalam kerja sama dengan guru dan petugas pendidikan lainnya.¹²
2. Menurut Kerney dalam W. Mantja: Supervisi pendidikan adalah prosedur memberikan pengarahan dan memberikan evaluasi terhadap proses instruksional. Sasaran akhir dari supervisi adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada semua siswa.¹³
3. Menurut Boardman, Douhglass dan Bent (1961), seperti yang dikutip oleh W. Mantja: Supervisi pendidikan adalah usaha mendorong, mengkoordinasikan dan membimbing perkembangan guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar merek mendapatkan pengertian yang lebih baik dan secara efektif melaksanakan semua fungsi mengajar sehingga mereka lebih dimungkinkan mendorong dan

¹⁰ Nurtain, *Supervisi ...*, 10.

¹¹ Ali Sudin, “Implementasi Supervisi Akademik Terhadap Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar Se Kabupaten Sumedang”, dalam *Jurnal Pendidikan Dasar*, Nomor 9, April 2008, 1.

¹² Soetopo, Hendiyat, Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 41-42.

¹³ Chester T. McKerney, *Educational Supervision*, (New York: McGraw-Hill Book, Co. 1951), 1.

membimbing perkembangan siswa ke arah partisipasi yang kaya dan intelijen dalam masyarakat.¹⁴

4. Menurut Haris dan Benssent, supervisi sebagai suatu tindakan administratif yakni: “supervisi adalah apa yang dilakukan personalia sekolah dengan orang dewasa dan barang-barang dengan maksud untuk memelihara atau merubah penyelenggaraan sekolah agar supaya secara langsung dapat mempengaruhi tujuan-tujuan pengajaran pokok sekolah.”¹⁵
5. Kimball Wiles mendefinisikan Supervisi sebagai berikut: memandang supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia, yang bekerja dengan semua orang dalam lingkungan.¹⁶
6. Sergiovanni dan Starret berpendapat bahwa supervisi pendidikan adalah: secara tradisional supervisi dipandang sebagai daerah orang yang bertanggungjawab terhadap perbaikan pengajaran.¹⁷
7. Supervisi pendidikan menurut konsep kasar buku tahunan ASCD adalah: “Yang kami maksudkan dengan”supervisor tidak hanya orang-orang yang memiliki sebutan gelar saja akan tetapi juga termasuk kepala sekolah , ketua departemen, termasuk pula semua orang bertanggungjawab membantu staf lainnya meningkatkan kemampuan mereka.”¹⁸
8. Alfonso, Firt dan Neville mendefinisikan supervisi ditemukan dalam semua organisasi yang kompleks. Hal ini disebabkan karena organisasi ditetapkan untuk memelihara organisasi itu sendiri dan kadang-kadang juga menaruh perhatian terhadap perbaikan dan pemurnian organisasi Sumber-sumber organisasi harus dipakai untuk menganalisis efisiensi dan efektifitas. Deskripsi supervisi dalam sistem reproduksi organisasi ini mempunyai implikasi konsekuensi yang berarti terhadap pendidik yang terkait dalam supervisi pengajaran. Sekolah dipandang sebagai satu sistem pendidikan.
9. Menurut Mosher dan Purpel supervisi pendidikan adalah supervisi yang menitik beratkan pada fungsi kependidikan.¹⁹
10. Menurut Kerney: supervisi prosedur memberikan pengarahan dan memberikan evaluasi kritis terhadap proses instruksional. Sasaran

¹⁴ W. Manca, *Bahan Ajar Model Pembinaan/Supervisi Pengajaran (MPD 530)(bagi Program S-2 Manajemen Pendidikan PPS UM)*, Malang: Program Pascasarjana Universitas Malang, 2000, 2-3.

¹⁵ Haris dan Benssent, *Supervisory behavior in Education, Second Edition*, Prentice hal, Inc: Englewood Cliffs: New Jersey. 1971, 31

¹⁶ Kimball Wiles, dan Lovell, John T. *Supervision for Better School*, 4 ed, rentice-Hall, inc, Englewood Cliffs, NJ 1975, 10.

¹⁷ Sergiovanni, Thomas J. Dan Starratt, Robert J. *Supervision: Human Perspectives*, New York: John Willey and Somea 1956, 3.

¹⁸ Nurtain, *Supervisi Pengajaran ...*, 14.

¹⁹ *Ibid.*, 15.

akhir dari supervisi adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada siswa.

11. Menurut Boardman, Douglass dan Bent (1961) supervisi pendidikan adalah usaha mendorong, mengkoordinasikan dan membimbing perkembangan guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mendapatkan pengertian yang lebih baik dan secara efektif melaksanakan semua fungsi mengajar sehingga mereka lebih memungkinkan mendorong dan membimbing perkembangan siswa ke arah partisipasi yang kaya dan intelegen dalam masyarakat.²⁰
12. Menurut Mantja supervisi pendidikan adalah: pengajaran atau pembelajaran dilakukan untuk mengawasi kegiatan sekolah dengan tujuan: kegiatan pendidikan berjalan dengan baik.
13. Menurut M. Ngalim Purwanto, supervisi pendidikan mempunyai pengertian yang luas yaitu segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personil sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.²¹

Dari segi bahasa istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya “di atas”, dan vision mempunyai arti “melihat”, maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai “melihat dari atas”. Dengan pengertian itulah maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru.

Dalam pengertian lain, Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.

²⁰ Adam and Dicky: *Basic Principles of Supervision*, (Ed. Bostom: Allyn and Bacon), 1953, 5.

²¹ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2005), 76.

Dengan demikian hakekat supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para siswa, untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat.

Secara sederhana supervisi dirumuskan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh supervisor untuk memberikan bantuan kepada guru dalam memperbaiki pengajaran.²²

Disamping itu juga memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, bertanggung jawab dan memenuhi akuntabilitas. Sedangkan yang melakukan supervisi disebut supervisor. Bimbingan di sini mengacu pada usaha yang bersifat manusiawi serta tidak bersifat otoriter. Memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif terkandung makna di dalamnya bekerja dan belajar secara disiplin, tanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. Jadi seorang pendidik itu tidak hanya mendidik dan mengajar akan tetapi dia juga harus masih belajar bagaimana cara-cara mendidik yang baik dan benar. Sehingga makna bahwa belajar tidak mengenal umur itu memang harus direalisasikan.

Dalam bahasan mengenai supervisi pendidikan apalagi yang dibahas adalah supervisi pendidikan islam, maka tidak lepas dari dasar ayat

²² Togap, P. Simandjutak, "Supervisi dan Peningkatan Profesionalisme", dalam *Jurnal Dinamikan Pendidikan*, Vol. 1 No.1, Agustus 2007, 87.

Al-Qur'an yang menguatkan. Adapun ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar supervisi terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”²³

Dari ayat tersebut dapat kita tangkap bahwa supervisor harus bisa menjadi contoh atau suri teladan bagi para guru yang disupervisi sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan bagi umat.

c. Proses Supervisi Pendidikan

Mengenai proses supervisi yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan supervisi mencakup persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut.

1. Persiapan

Kegiatan persiapan yang perlu dilakukan adalah:

- a) Penyusunan program supervisi dan organisasi supervisi. Dalam program supervisi harus tercermin: jenis kegiatan, sasaran, pelaksanaan, waktu dan instrument. Dalam organisasi supervisi tercermin mekanisme, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.
- b) Menyiapkan instrument atau penjelasan teknis pelaksanaan supervisi dan kebijakan terbaru tentang petunjuk pelaksanaan pendidikan sekolah.

2. Pelaksanaan Supervisi

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Depag RI, 1989), 420.

- a) Supervisi harus berkesinambungan
 - b) Supervisi berhasil apabila pelaksanaan dilakukan pada awal dan akhir semester untuk dibandingkan.
 - c) Terampil menggunakan instrument
 - d) Mampu mengembangkan instrument
 - e) Supervisi bukan menggurui tetapi bersifat pemecahan masalah.
 - f) Supervisi harus mencakup teknis administratif dan edukatif
 - g) Supervisor harus menguasai materi yang akan disupervisi
3. Penilaian kegiatan supervisi
- a) Keterlaksanaan progres supervisi
 - b) Kemantapan instrument
 - c) Hasil supervisi
 - d) Kendala dalam pelaksanaan supervisi atau hasil supervisi.
4. Tindak lanjut dalam supervisi
- a) Langkah-langkah pembinaan
 - b) Program supervisi selanjutnya.²⁴

d. Tujuan Supervisi Pendidikan

Tujuan supervisi pendidikan adalah mengembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih kuat. Usaha perbaikan belajar dan mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal.²⁵

Tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan

²⁴ Ahmad Azhari, *Supervisi Rencana Program Pembelajaran*, (Jakarta: Rian Putra, 2004), 7.

²⁵ Piet A Sahertian dan Frans Mataheru, *Prinsip dan Teknik Supervisi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1981), 40.

pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur dan teknik evaluasi pengajaran. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Fokusnya bukan pada seorang atau sekelompok orang, akan tetapi semua orang seperti guru-guru, para pegawai, dan kepala sekolah lainnya adalah teman sekerja yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik.

Bukti secara nasional tujuan konkrit dari supervisi pendidikan adalah:

1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan
2. Membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid.
3. Membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern.
4. Membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri.
5. Membantu guru-guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya.
6. Membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah.²⁶

Sedangkan Piet A. Sahartian menambahkan:

1. Membantu guru-guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat dan seterusnya.

²⁶ Ibid., 41.

2. Membantu guru-guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru-guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka.²⁷

Jika dalam perguruan tinggi supervisi juga dilakukan dengan dasar-dasar supervisi yang telah ada. Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul Dasar - Dasar Supervisi, ditinjau dari kegiatan supervisi , maka supervisi dapat dibedakan menjadi dua , yakni²⁸ :

1. Supervisi akademik adalah supervisi yang obyeknya menitik beratkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen untuk membantu mahasiswa ketika “sedang dalam proses belajar atau mempelajari sesuatu“. Disebut supervisi akademik karena obyek utamanya adalah aspek- aspek akademik. Supervisi akademik dapat dilakukan oleh intern lembaga sendiri yaitu oleh teman sejawat, ketua program studi atau Pembantu Rektor I bidang akademis.
2. Supervisi administrasi adalah supervisi yang obyeknya menitik beratkan pengamatan pada aspek- aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperlancar terlaksananya proses pembelajaran, dapat berupa kurikulum sekolah, penentuan dosen pengampu mata kuliah, penyusunan jadwal kuliah, laporan nilai mahasiswa , presensi kehadiran

²⁷ Piet A Sahertian, *Prinsip dan Teknik....*, 24.

²⁸ Retao Djokar Juliani, “Model, Pendekatan dan Teknik Supervisi Pendidikan di Perguruan Tinggi”, dalam *Jurnal Administrasi Niaga FISIP Universitas Pandanaran*, 2011, 3.

dosen dan mahasiswa, rasio dosen dan mahasiswa, tingkat pendidikan dosen dan tenaga kependidikan, prestasi yang diperoleh mahasiswa dsb. Supervisi administrasi dapat dilakukan oleh internal lembaga.

Kegiatan supervisi yang tanpa menunjuk pada obyek lingkup nomor (1) dan (2), yaitu pembelajaran serta semua faktor pendukungnya, seluruhnya itulah yang disebut sebagai supervisi pendidikan, sedang apabila menentukan obyeknya maka dikatakan sebagai supervisi pengajaran.²⁹

e. Fungsi Supervisi Pendidikan

Sebagaimana W.H. Burton dan J. Bruckner menjelaskan bahwa fungsi utama dari supervisi modern adalah menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi hal belajar.³⁰ Sedangkan Kimball Wiles lebih tegas lagi mengatakan bahwa fungsi dasar dari supervisi adalah memperbaiki situasi belajar anak-anak.³¹

Makin jauh pembahasan tentang supervisi makin nampak bahwa kunci supervisi bukan hanya membicarakan perbaikan itu sendiri, melainkan supervisi yang diberikan kepada guru-guru. Menurut T.H. Briggs juga merupakan alat untuk mengkoordinir, menstimulir dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru.³² Di sini nampak dengan jelas

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 5.

³⁰ Burton, W.H. dan Lee J. Bruckner, *Supervision*, New York: Applent Century-Croff, Inc. 1955. 3.

³¹ Wiles, Kimball, *Supervision for...*, 10.

³² Briggs, T. H., *Improving Instruction*, (New York, The mac Millan Company, 1938), 2.

implikasi perubahan-perubahan masyarakat yang membawa konsekuensi dalam cara mengatur langkah-langkaah perbaikan pengajaran. Perubahan masyarakat menentukan dimensi-dimensi baru terhadap fungsi supervisi.

Swearingen memberi 8 fungsi supervisi yaitu;

1. Mengkoordinir semua usaha sekolah.
2. Memperlengkapi kepala sekolah.
3. Memperluas pengalaman guru-guru.
4. Menstimulir usaha-usaha yang kreatif.
5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus.
6. Menganalisa situasi belajar dan mengajar.
7. Memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf.
8. Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.³³

f. Model Supervisi Pendidikan

Yang dimaksud model dalam uraian ini adalah suatu pola, contoh dan acuan dari supervisi pendidikan yang diterapkan. Ada berbagai model supervisi yang berkembang.

1. Model Supervisi yang Konvensional (Tradisional)

Model ini tidak lain dari refleksi dari kondisi masyarakat pada suatu saat. Pada saat kekuasaan yang otoriter dan feodal akan berpengaruh pada sikap pemimpin yang otoriter dan korektif.

³³ Swearingen, *Supervision of Instruction*, (New York: John Willey and Somes, 1956), 242.

Supervisor yang cenderung untuk mencari-cari kesalahan dan menemukan kesalahan. Kadang-kadang bersifat memata-matai. Mencari kesalahan dalam membimbing sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan supervisi pendidikan. Akibatnya guru-guru merasa tidak puas dan ada dua sikap yang tampak dalam kinerja guru:

- a) Acuh tak acuh (masa bodoh)
- b) Menantang (agresif)³⁴

2. Model Supervisi yang bersifat Ilmiah

Supervisi yang bersifat ilmiah memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a) Dilaksanakan secara berencana dan kontinyu
- b) Sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu
- c) Menggunakan instrument pengumpulan data
- d) Ada data yang obyektif yang diperoleh dari keadaan yang riil.³⁵

3. Model Supervisi Klinis

Supervisi klinis sebagai suatu sistem instruksional yang menggambarkan perilaku supervisor yang berhubungan erat secara langsung dengan guru atau kelompok guru untuk memberikan dukungan, membantu, menyelami guru untuk meningkatkan hasil kerja guru dalam mendidik siswa.³⁶ Supervisi klinis difokuskan pada

³⁴ Piet A Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, ((Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 35.

³⁵ *Ibid.*, 36

³⁶ Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.

perbaikan pembelajaran melalui siklus yang sistematis mulai dari tahap perencanaan, pengamatan dan analisis yang intensif terhadap penampilan pembelajarannya dengan tujuan memperbaiki proses pembelajaran.

g. Metode Pendekatan Supervisi Pendidikan

Supervisor semestinya membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan profesional guru. Iklim atau suasana yang diciptakan harus bebas dari rasa takut, ancaman atau paksaan. Agar guru terhindar dari rasa takut, terancam atau paksaan, maka supervisor perlu menggunakan pola pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik guru, dimana masing-masing guru memiliki kebutuhan dan karakteristik yang tidak sama. Orientasi atau pendekatan dalam pelaksanaan supervisi, diantaranya didasarkan atas tingkat perkembangan guru.

Dalam kegiatan supervisi dimana seorang guru dianggap sebagai seorang yang sedang belajar, tentunya senantiasa memperhatikan kebutuhan dan karakteristik guru. Selanjutnya, guru harus diperhatikan sebagai individu dan diperlakukan sesuai dengan orientasi atau pendekatan yang cocok bagi guru tersebut. Dengan pendekatan yang sesuai maka para guru akan mampu meningkatkan kompetensi profesional secara mandiri dan pada akhirnya akan menjadikan sekolahnya menjadi sekolah yang bermutu.

Berikut ini penjelasan mengenai macam-macam pendekatan dalam supervisi pendidikan, yaitu:

1. Pendekatan Supervisi Direktif

Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat langsung.³⁷ Supervisor memberikan arahan secara langsung kepada kepala sekolah dan guru-guru yang disupervisi sehingga perilaku supervisor lebih dominan.

Supervisi dengan pendekatan direktif adalah pendekatan yang didasarkan atas keyakinan, bahwa mengajar terdiri dari ketrampilan teknis dengan standard dan kompetensi yang telah ditetapkan bagi semua guru, agar penampilan mengajar mereka lebih efektif.³⁸

Supervisi dengan pendekatan direktif mengasumsikan bahwa mengajar terdiri dari sejumlah ketrampilan teknis yang sesuai dengan kompetensi profesional guru bagi semua guru supaya mampu mengajar atau menampilkan unjuk kerja yang efektif.

2. Pendekatan Supervisi Non Direktif

Pendekatan tidak langsung (non-direktif) adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan guru-

³⁷ Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan ; Terobosan Baru dalam Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah dan Guru*, (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2013), 68.

³⁸ Binti Maunah, *Supervisi Pendidikan Islam; Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 136.

guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pemahaman psikologis humanistik.³⁹

Pada pendekatan non direktif, guru menunjukkan tanggung jawab yang tinggi. Tugas supervisor pada pendekatan ini adalah mendengarkan dan memperhatikan dengan cermat akan keprihatinan guru terhadap masalah peningkatan pengajarannya, dan sekaligus gagasan guru sebagai upaya mengatasinya. Peranan supervisor adalah meminta penjelasan terhadap hal – hal yang telah diungkapkan oleh guru, terutama hal yang kurang dipahaminya. Selanjutnya, ia mendorong guru untuk mewujudkan inisiatif yang dipikirkan oleh guru untuk memecahkan masalah yang dihadapinya serta meningkatkan pengajarannya.

3. Pendekatan Supervisi Kolaboratif

Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non–direktif menjadi pendekatan baru. Pada pendekatan ini baik supervisor maupun guru bersama-sama, bersepakat untuk menetapkan struktur, proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi

³⁹ Lukluk Nur Mufidah, *Supervisi Pendidikan*, (Jember: Center for Society Studies, 2008), 36.

guru.⁴⁰ Pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Psikologi kognitif beranggapan bahwa belajar adalah hasil panduan antara kegiatan individu dengan lingkungan pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah. Dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.⁴¹

Dengan memahami karakteristik diatas dapat diilustrasikan bahwa dengan pendekatan kolaboratif, supervisi yang diterapkan akan terasa tenang dan tidak mengandung ketegangan. Bahkan sebaliknya yang muncul adalah suasana akrab dan saling memahami antar satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena supervisor menempatkan dirinya sebagai mitra bagi guru yang disupervisi bukan sebagai supervisor yang mencari kesalahan dari guru.

Disamping itu supervisi kolaboratif memberikan ruang terbuka bagi guru sehingga guru mendapat kesempatan yang luas guna menyampaikan ide ataupun masalah-masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Sehingga dari diskusi yang dilakukan akan muncul ide-ide baru yang merupakan problem solving dalam problem-problem yang ditemukan dalam proses pembelajaran.

⁴⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*, Diva Press, Yogyakarta 2012 hal 45

⁴¹ *Ibid.* , 47.

h. Prinsip Supervisi Pendidikan

Seorang supervisor apakah dia Kepala Sekolah, penilik Sekolah atau pengawas dalam melaksanakan supervisi hendaknya berlandaskan pada prinsip-prinsip supervisi. Supervisi pendidikan mempunyai prinsip-prinsip sebagai aktivitas pembinaan guru, antara lain hendaknya supervisi dilaksanakan secara ilmiah, demokratis, kooperatif, konstruktif dan kreatif.⁴²

Untuk uraian dari masing-masing prinsip sebagai berikut:

1. Ilmiah (*scientific*) yang berarti kegiatan supervisi harus sistematis, obyektif, dan menggunakan instrumen atau sarana yang memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat menjadi bahan masukan dalam mengadakan evaluasi terhadap situasi belajar mengajar. Sistematis yaitu dilaksanakan secara teratur, berprogram dan kontinu. Maksudnya kegiatan supervisi memiliki perencanaan yang pasti, teratur, pelaksanaannya secara berkelanjutan dan terus menerus. Walaupun setelah diadakan supervisi, seorang pendidik sudah benar-benar menjadi pendidik profesional sekalipun, supervisi masih harus dilaksanakan secara kontinu. Bertujuan untuk menjaga mutu atau kualitas seorang pendidik tersebut. Karena tidak mungkin seseorang tidak menemukan kesulitan dalam setiap kegiatan atau aktifitas yang sedang dihadapi. Untuk memecahkan

⁴² Kisbiyanto, *Supervisi Pendidikan*, (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 10.

problematika yang muncul dalam kegiatan pembelajaran dapat diatasi dengan supervisi. Sedangkan obyektif yaitu berdasar pada data dan informasi.

2. Demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain. Supervisor yang demokratis diharapkan selalu berusaha secara kontinu menjalin pertalian dan kesatuan yang optimal diantara guru-gurunya. Selalu berusaha menerapkan cara-cara yang demokratis dalam setiap urusan.
3. Kooperatif, yaitu mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Dalam hal ini supervisor hendaknya dapat bekerjasama dengan guru, peserta didik, dan masyarakat sekolah yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar.
4. Konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif dalam menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Sikap supervisor yang memaksakan kehendak, menakut-nakuti guru, yang melumpuhkan kreativitas anggota staf perlu diubah. Sikap korektif yang mencari-cari kesalahan harus diganti dengan sikap kreatif dimana setiap orang mau dan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kreativitasnya untuk perbaikan pengajaran.

Menurut Suharsimi Arikunto, prinsip-prinsip supervisi pendidikan ialah:⁴³

1. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan, dan bukan mencari-cari kesalahan.
2. Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung.
3. Apabila pengawas atau kepala sekolah merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa.
4. Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala.
5. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi.
6. Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan singkat berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan.

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi dilingkungan pendidikan ialah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana guru-guru merasa aman dan merasa

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Supervisi* (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2006), 19-21.

diterima sebagai subyek yang dapat berkembang sendiri. Pelaksanaan supervisi pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Dengan cara memahami dan menguasai dengan seksama tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga pendidikan profesional yang harus melaksanakan kegiatan pengajaran dan pendidikan. Jika sikap supervisor memaksakan kehendak, menakut-nakuti, perilaku negatif lainnya, maka akan menutup kreativitas bagi guru. Jika sikap supervisor hanya seperti itu, maka ia belum mengetahui tugas pokok fungsi sebagai seorang supervisor.

i. Faktor Pendukung Dan Penghambat Supervisi Pendidikan

Keberhasilan supervisi pendidikan ditentukan pula oleh faktor pendukung dan pengambatnya, faktor pendukung dan penghambat merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan karena sifatnya yang saling berlawanan dalam hubungan timbal balik. Dengan demikian aspek yang menjadi faktor pendukung sekaligus mungkin pula sebagai faktor penghambat, jika aspek itu lebih dominan sebagai faktor pendukung maka kecilnya peranannya sebagai faktor penghambat begitu pula sebaliknya. Yang menjadi faktor pendukung dan penghambat keberhasilan supervisi pendidikan adalah segala aspek yang berhubungan dengan supervisi pendidikan yang menyangkut man dan material nya.⁴⁴ Person yang terkait

⁴⁴ Yusuf A. Hasan, Pedoman Pengawas untuk Madrasah dan Sekolah Umum, (Departemen Agama RI, 2002), 94

dengan supervisi pendidikan adalah Pengawas sebagai pelaku supervisi, Kepala Madrasah, dan Guru, sedang unsur materialnya adalah segala sarana prasarana yang terkait dengan kegiatan supervisi pendidikan dan kegiatan pembelajaran.

2. Pengawas Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pengawas Pendidikan Agama Islam

Mengacu pada Surat Keputusan MENPAN pengawas sekolah di lingkungan Kementerian Agama khususnya direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama Islam yang kemudian diberi istilah “Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)” sehingga muncul beberapa pengertian yang lebih spesifik tentang pengawas pendidikan agama islam diantaranya ialah:⁴⁵

1. Menurut KEPMENPAN Nomor 118/1996 (Pasal 1 ayat 1), pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah.

⁴⁵ Pupuh Fathurrohman, dkk., *Supervisi Pendidikan Dalam Pengembangan Proses Pengajaran* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 141-142

2. Menurut KEPMENPAN Nomor 118/1996 (Pasal 3 ayat 1), pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sekolah tertentu yang ditunjuk. Berdasarkan peraturan KEPMENPAN tersebut pengawas sekolah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak ada kualifikasi baik dari guru ataupun kepala sekolah.
3. Menurut PERMENDIKNAS No. 12 Tahun 2007, pengawas sekolah adalah guru yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan sekolah menengah.
4. Menurut PERMENAG Nomor 2 Tahun 2012 (bab 1 Pasal 1 ayat 4), Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) yang disebut pengawas pendidikan agama islam pada sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama islam yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama islam pada sekolah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai negeri sipil dari lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas,

tanggung jawab dan wewenang penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di Sekolah Umum dan penyelenggaraan pendidikan di Madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan baik dari segi teknis pendidikan maupun administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah.⁴⁶

b. Tujuan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Secara umum tujuan pengawasan adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru.⁴⁷

Dari tujuan tersebut maka sudah jelas bahwa pengawas pendidikan agama islam mengemban tugas dan amanat membantu pencapaian tujuan pendidikan di sekolah atau madrasah. Disamping itu juga meningkatkan kemampuan kepala sekolah/madrasah dan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dan melaksanakan kegiatan akademis.

c. Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam

Sejalan dengan uraian tentang tujuan dari pengawas pendidikan agama islam, maka pengawas pendidikan agama islam mempunyai tugas-tugas utama antara lain:

⁴⁶ Depag RI. *Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendidais*, (Jakarta: 2003), 5.

⁴⁷ A. Piet Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik ...*, 19

1. Sebagai nara sumber bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugasnya, serta dalam melakukan evaluasi diri, sehingga guru dapat secara terus-menerus meningkatkan kinerjanya.
 2. Sebagai fasilitator dan bahkan pembimbing yang membantu guru dalam mengatasi kekurangan yang dialami.
 3. Sebagai motivator yang dengan berbagai cara selalu mengupayakan agar guru mau bekerja lebih bersungguh-sungguh dan semangat. Termasuk disini memberikan tekanan (*pressure*) dan dukungan (*support*) agar guru mencapai hasil pengajarannya.
 4. Sebagai aparat pengendali mutu pengajaran (*quality assurance auditor*) yang secara periodik dan sistematis mengecek, menganalisis,⁴⁸ mengevaluasi dan mengarahkan serta mengambil tindakan agar peningkatan efektifitas pengajaran terlaksana dengan baik dan berhasil.
- d. Konsep Islam Tentang Pengawas

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan dengan konsisten. Dalam konsep pendidikan islam, pengawasan dilakukan baik secara material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-hal yang bersifat spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam konsep Islam dengan

⁴⁸ Yusuf A. Hasan, *Pedoman Pengawasan untuk Madrasah dan Sekolah Umum*, (Jakarta: Mekar Jaya, 2002), 21.

konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat materil dan tanpa melibatkan Allah Swt sebagai pengawas utama.

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Ilmu Manajemen diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya pengawasan, salah satunya di dalam Surat Al-Mujadalah ayat 7 sebagai berikut:⁴⁹

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ
سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا
كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

⁴⁹ QS. Al-Mujadalah ayat 7

Tujuan melakukan pengawasan, pengendalian dan koreksi adalah untuk mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Tujuan lainnya adalah agar kualitas kehidupan terus meningkat. Inilah yang dimaksud dengan tausiyah dan bukan untuk menjatuhkan. Fungsi manajerial pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kerja bawahan, untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan rencana yang didesain sedang dilaksanakan dengan penuh ketaqwaan dan tanggung jawab.

3. Mutu Madrasah Ibtida'iyah

Mutu berasal dari Bahasa Inggris "*quality*" yang berarti kualitas.⁵⁰ Secara umum, mutu diartikan sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.⁵¹ Sedangkan, pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia.⁵² Jadi, mutu pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Sedangkan mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

Mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan. Kerangka filosofi pendidikan dalam pengembangan sekolah bermutu adalah kesesuaian input, proses dan hasil sekolah dengan

⁵⁰John M. Echols dan Hasan Shadhily, *Kamus Inggris Indonesia*(Jakarta: Gramedia, 1976), 327.

⁵¹Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. Yosol Irinatara (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),75.

⁵²Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi* FF.duskatif, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 22.

kebutuhan para pemangku kepentingan. Kerangka filosofi ini harus menjadi kerangka berpikir seluruh komponen penyelenggara pendidikan di dalam satuan pendidikan.

Standar mutu pendidikan yang disebut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di dalam undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.⁵³

Dari pengertian mutu pendidikan diatas jika dihubungkan dengan mutu madrasah ibtida'iyah maka bisa diartikan sebagai kualitas Madrasah Ibtida'iyah atau Madrasah Ibtida'iyah yang berkulitas. Istilah mutu memiliki pengertian yang cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan pertentangan. Hal ini disebabkan karena tidak ada ukuran yang baku tentang mutu itu sendiri. Sehingga sulit kiranya untuk mendapatkan sebuah jawaban yang sama, apakah sesuatu itu bermutu atau tidak. Namun demikian ada kriteria umum yang telah disepakati bahwa sesuatu itu dikatakan bermutu, pasti ketika bernilai baik atau mengandung makna yang baik. Secara esensial istilah mutu

⁵³ Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, BAB IX Standar Pendidikan Nasional, Pasal 35 ayat 1.

menunjukkan kepada sesuatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang dan atau kinerjanya.⁵⁴

Dalam hal ini Madrasah Ibtida'iyah diuntut bisa memberikan kepada pengguna jasa pendidikan dengan cara meningkatkan kinerja personil madrasah (kepala sekolah, guru dan karyawan). Madrasah harus lebih kreatif dalam mengembangkan program madrasah, meningkatkan kualitas belajar mengajar dan mengelola manajemen dengan baik agar dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan telaah terhadap karya terdahulu. Berkaitan dengan supervisi maka peneliti paparkan beberapa penelitian terdahulu yang relative sama dan relevan diantaranya:

1. Ashif Az Zafi, tesis dengan judul *Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 7 Purworejo*, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 7 purworejo

⁵⁴ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 9.

melaksanakan supervisi akademik dengan cara pembinaan, pemantauan, penilaian dan tindak lanjut secara berkelanjutan.⁵⁵

2. Ahmad Ihsanuddin, tesis dengan judul *Implementasi Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI SD di Kecamatan Berbah*, (Pascasarjana IAIN Surakarta, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah supervisi yang dilakukan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI dilakukan dengan pembinaan, penilaian dan monitoring menyangkut aspek-aspek kompetensi pedagogik.⁵⁶
3. Fitriani, tesis dengan judul *Model Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Multikasus di MTs Negeri Batu dan SMP Ar-Rohmah Putri Malang*, (Pascasarjana UIN Malang, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah model supervisi yang digunakan Kepala MTs Negeri Batu lebih menekankan pada model supervisi klinis face to face, sedangkan kepala SMP Ar-Rohmah Putri Malang menekankan pada model supervisi pendampingan.⁵⁷

⁵⁵ Ashif Az Zafi, *Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 7 Purworejo*, Tesis, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: 2009).

⁵⁶ Ahmad Ihsanuddin, *Implementasi Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI SD di Kecamatan Berbah*, Tesis tidak diterbitkan, (Surakarta: 2015).

⁵⁷ Fitriani, *Model Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Multikasus di MTs Negeri Batu dan SMP Ar-Rohmah Putri Malang*, Tesis, tidak diterbitkan, (Malang:2015).

4. Mulyawan Safwandy Nugraha, jurnal dengan judul *Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, (STAIN Sukabumi, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh Kepala Madrasah tidak sistematis dan tidak terprogram, sehingga guru-guru tidak merasakan adanya bantuan dari Kepala Madrasah dalam peningkatan kualitas pembelajaran.⁵⁸
5. Nur Hasanah, jurnal dengan judul *Dampak Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah di Kota Salatiga*, (IAIN Salatiga). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kompetensi profesional guru di Madrasah Ibtida'iyah Kota Salatiga belum melakukan penguasaan media pembelajaran berbasis teknologi, penelitian dan pengembangan. Rendahnya motivasi kerja dan supervisi akademik.⁵⁹

⁵⁸ Mulyawan Safwandy Nugraha, *Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, Jurnal STAIN Sukabumi, Vol. 9, No.1, Arpil 2015.

⁵⁹ Nur Hasanah, *Dampak Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah di Kota Salatiga*, Jurnal IAIN Salatiga, Vol. 9, No. 2, Desember 2015.

No	Nama	Hasil Penelitian	Hasil	
			Persamaan	Perbedaan
1	Ashif Az Zafi, <i>Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 7 Purworejo</i> , Tesis, Kualitatif, (Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga: 2016)	Pengawas Pendidikan Agama Islam SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 7 Purworejo melaksanakan ruang lingkup supervisi akademik dengan cara pembinaan, pemantauan, penilaian dan tindak lanjut secara berkelanjutan	Teknik supervisi yang digunakan sama-sama menggunakan teknik observasi atau kunjungan yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam	Perbedaan terletak pada tingkat lembaga yang di supervisi yaitu SMA dengan Madrasah Ibtida'iyah
2	Ahmad Ihsanuddin, <i>Implementasi Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI SD di Kecamatan Berbah Sleman</i> , Tesis, Kualitatif, (Pasca Sarjana IAIN Surakarta: 2015)	Supervisi yang dilakukan PPAI dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru PAI di lakukan dengan baik. Pengawas melakukan pembinaan, penilaian dan monitoring menyangkut aspek-aspek kompetensi pedagogik	Persamaan terletak pada supervisor yang dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam dan bertugas melakukan pembinaan, penilaian dan monitoring	Perbedaan dengan yang peneliti sedang teliti terletak pada kompetensi pedagogik Guru PAI SD
3	Fitriani, <i>Model Supervisi Akademik Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Multikasus di MTs Negeri Batu dan SMP Ar-Rohmah Putri Malang)</i> , Tesis, Kualitatif, (Pasca Sarjana UIN Malang: 2015)	Model Supervisi yang digunakan Kepala MTs Negeri Batu lebih menekankan pada model supervisi klinis <i>face to face</i> , sedangkan Kepala SMP Ar-Rohmah Putri Malang menekankan pada model supervisi pendampingan	Persamaan terletak pada supervisi dilakukan di dua lokasi (Studi Multikasus)	Perbedaan terletak pada supervisor yang dilakukan oleh kepala madrasah sedangkan yang peneliti sedang teliti supervisor adalah Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)
4	Mulyawan Safwandy Nugraha (Vol.9, No.1, April 2015), <i>Pelaksanaan Supervisi Akademik oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat</i> , Jurnal, Kualitatif (STAIN Sukabumi: 2015)	Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan oleh Kepala Madrasah tidak sistematis dan tidak terprogram, sehingga guru-guru tidak merasakan adanya bantuan dari Kepala Madrasah dalam peningkatan kualitas	Persamaan terletak pada lokasi yang diteliti tidak hanya satu lokasi dan supervisi dilakukan di sebuah Madrasah	Perbedaan terletak pada supervisor, kalau supervisor seorang pengawas pendidikan agama islam supervisi yang dilakukan terprogram

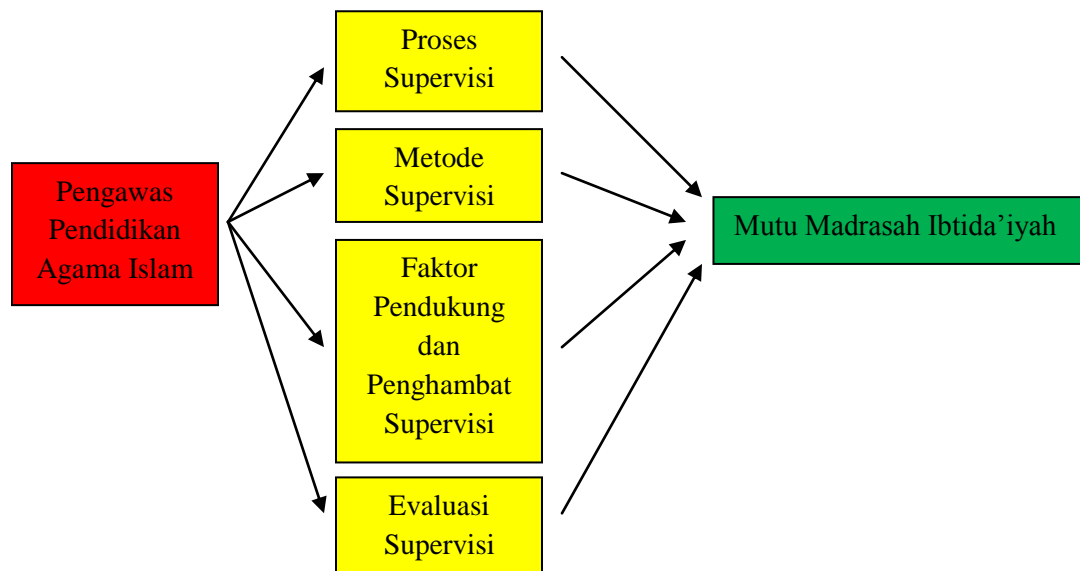
		pembelajaran		
5	Nur Hasanah (Vol.9, No.2, Desember 2015), Dampak Kompetensi Profesional Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah di Kota Salatiga, Jurnal, Kualitatif, (IAIN Salatiga: 2015)	Kompetensi profesional guru Madrasah Ibtida'iyah Kota Salatiga belum melakukan penguasaan media pembelajaran berbasis teknologi, penelitian dan pengembangan. Rendahnya motivasi kerja dan supervisi akademik	Persamaan yang sangat mendasar terletak pada peningkatan mutu Madrasah Ibtida'iyah	Perbedaan terletak pada fokus yang diteliti tidak mengarah pada supervisi tetapi kompetensi profesional

Tabel: 2.1 Penelitian Terdahulu

C. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu dan teori.⁶⁰ Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah penelitian.

Penelitian ini menghendaki adanya kajian yang lebih rinci dan menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan cara studi kasus. Oleh karena itu pendekatan yang dipakai adalah paradigma kualitatif. Berikut ini merupakan gambaran paradigma penelitian:



Gambar: 2.1 Paradigma Penelitian

⁶⁰ Puspowarsito, *Metode Penelitian Organisasi dengan Aplikasi Program SPSS* (Bandung: Buahbatu, 2008), 14.